



2024 LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Esa rahmat dan berkah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat disusun dengan baik dan sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maka tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan perwujudan dari upaya untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Dokumen ini juga merupakan bagian dari upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi

pengelolaan sumber daya dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhir kata kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LAKIP Tahun 2024 ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Benteng, 10 Februari 2025

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH,**



NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19830525 200604 1 016

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, yang mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, yang mana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk pelaksanaan tugasnya tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar membantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusun kebijakan teknis fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
2. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan;

4. Pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
5. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
6. Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
7. Pengoordinasian penerimaan dana perimbangan dan penerimaan lainnya;
8. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
9. Pelaksanaan sistem akuntansi daerah;
10. Pelaksanaan pemungutan Pajak daerah dan retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
11. Pengoordinasian pemungutan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang dikelola oleh SKPD lainnya; dan
12. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) Indikator Kinerja Utama dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang realisasinya mencapai target yaitu Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP OPD, Indikator Kinerja Utama Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi (SAP), Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan BPKPD dan Indikator Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan IKU yang pencapaiannya di bawah 100% atau tidak mencapai target yaitu Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk IKU Opini BPK, IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan BPKPD, dan IKU Nilai SAKIP OPD yang dinilai masih berdasarkan tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun anggaran 2023.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	5
D. Isu-isu Strategis	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis	18
B. Indikator Kinerja Utama	22
C. Rencana Kerja Tahunan	26
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	62
A. Pengukuran Kinerja	63
B. Analisis Capaian Kinerja	68
C. Realisasi Keuangan	97
BAB IV PENUTUP	116
LAMPIRAN	121

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	20
Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah Tahun 2024	24
Tabel 2.3 : Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	26
Tabel 3.1 : Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target	65
Tabel 3.2 : Capaian Indikator Kinerja Utama	66
Tabel 3.3 : Indikator Kinerja Utama (IKU 1)	68
Tabel 3.4 : Indikator Kinerja Utama (IKU 2)	74
Tabel 3.5 : Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	76
Tabel 3.6 : Target dan Realisasi Hasil Pajak Daerah	77
Tabel 3.7 : Target dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah	80
Tabel 3.8 : Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	82
Tabel 3.9 : Target dan Realisasi Lain-Lain PAD yang SAH	83

Tabel 3.10 : Indikator Kinerja Utama (IKU 3)	85
Tabel 3.11 : Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	87
Tabel 3.12 : Kualitas Layanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	88
Tabel 3.13 : Indikator Kinerja Utama (IKU 4)	90
Tabel 3.14 : Indikator Kinerja Utama (IKU 5)	95
Tabel 3.15: Belanja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Tahun 2024	97
Tabel 3.16: Penyerapan terhadap pagu Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah per Program	98
Tabel 3.17: Perbandingan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024	99
Tabel 3.18: Realisasi Target Anggaran per Program per Kegiatan per Sub Kegiatan	100

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah organisasi perangkat daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah serta tugas pembantuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam mengimplementasikan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana yang di amanahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan realisasi kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada publik atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun anggaran 2024 sekaligus melaksanakan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai alat kontrol dan daya dorong dalam peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, serta sebagai *feedback* bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas juga memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 78 tentang Penilaian Kinerja, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 98 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dengan Metode “Silajara” di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Berdasar dari kondisi tersebut maka, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdiri sebagai bagian dari desain besar Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan seluruh proses pemerintahan dalam rangka merealisasikan keinginan bersama untuk mewujudkan *Good Governance*. SAKIP menuntut adanya sinergitas antara proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja.

Evaluasi terhadap AKIP merupakan isu paling strategis dalam SAKIP dikarenakan pada tahap akhir dari prosesnya akan mengindikasikan optimal atau tidaknya kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah, dan akan memperlihatkan sejauh mana kemajuan instansi pemerintah dalam menerapkan kinerja yang berfokus pada hasil. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa salah satu asas umum

penyelenggaraan negara adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus diertanggungjawabkan.

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja serta monitoring dan

evaluasi dari sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 khususnya Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah sebagai *feedback* dan alat kendali atau pemacu dalam meningkatkan kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.

C. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

1. Kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar dan pelaksanaan tugasnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sebagai organisasi perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan tersebut maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar harus bisa berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna.

Dalam pemenuhan realisasi target kinerja dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah di

- akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah;
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum Fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan;
 4. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalam lingkungan Badan;
 5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam hubungannya dengan masyarakat;
 6. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan penanganan tindak lanjut dan tuntutan ganti rugi;
 7. Menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan belanja daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 8. Menyelenggarakan pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola atau menatausahakan investasi daerah;
 9. Menyelenggarakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 10. Menyelenggarakan pemberian bantuan atas nama pemerintah daerah;

11. Menyelenggarakan pengelolaan utang dan piutang daerah;
12. Mengoordinasikan dan menyeleggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
13. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
14. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Badan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan
16. Menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

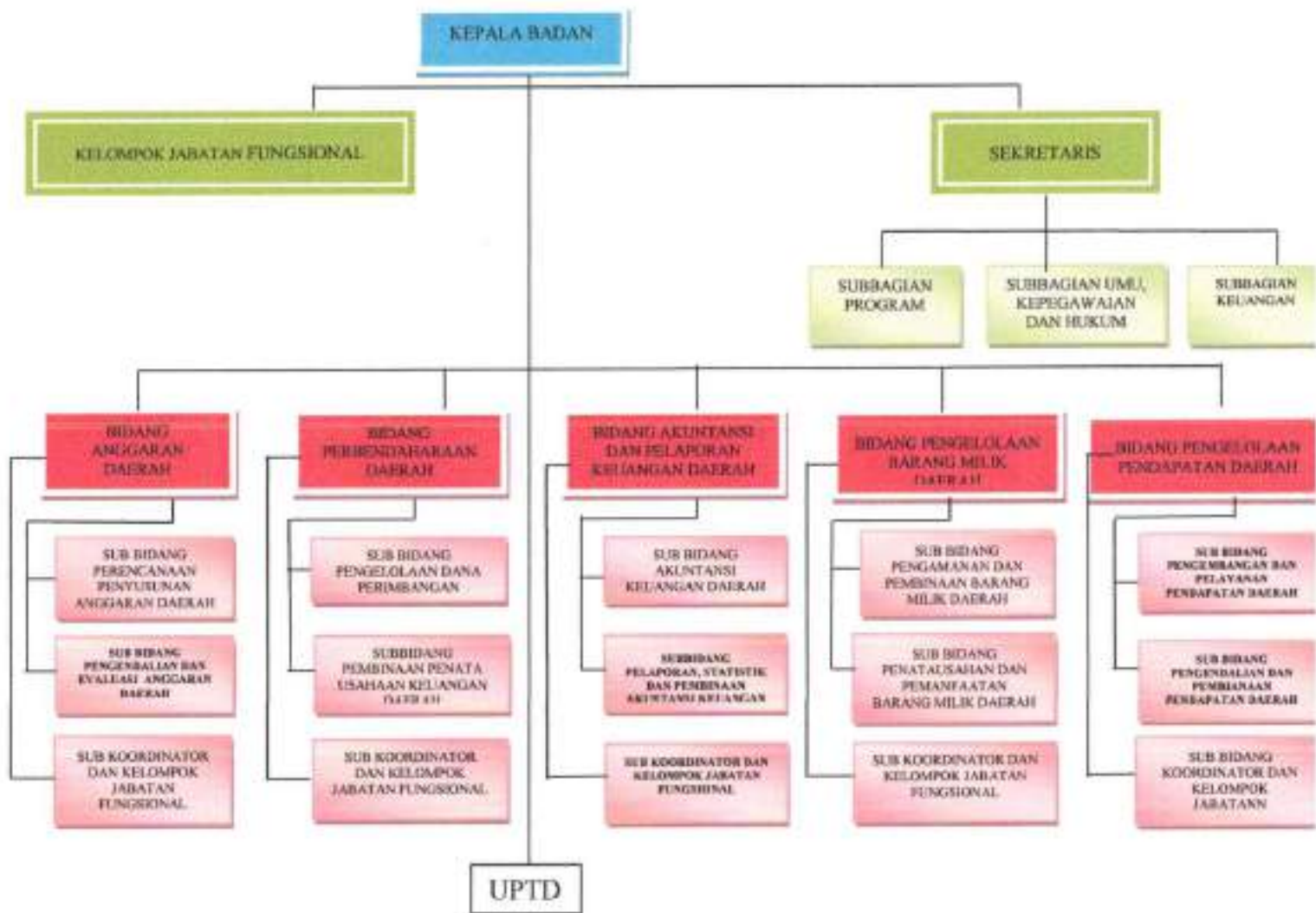
- I. Kepala Badan
- II. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub. Bagian Program;
 2. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 3. Sub. Bagian Keuangan.
- III. Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari atas :
 1. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah;
 - dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- IV. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan;
 2. Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- V. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah
 2. Sub Bidang Pelaporan, Statistik dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

VI. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas :

1. Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah;
2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

VII. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri atas :

1. Sub Bidang Pengembangan & Pelayanan Pendapatan Daerah;
2. Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah
3. Kelompok Jabatan Fungsional.



4. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh 50 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) golongan, meliputi : SLTA, D-3, S-1 dan S-2.

a. Berdasarkan pangkat dan golongan ruang

No	Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	1
3.	Pembina (IV/a)	5
4.	Penata Tingkat I (III/d)	12
5.	Penata (III/c)	9
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	6
7.	Penata Muda (III/a)	12
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	2
9.	Pengatur (II/c)	0
10.	Pengatur (II/b)	0
11.	Ahli Pertama/IX	2
JUMLAH		50

b. Berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S2	19
2.	S1	20
3.	D III	2
4.	SMA	9
JUMLAH		50

c. Berdasarkan jenis kelamin

No	Golongan	Jenis kelamin	
		Laki-laki	perempuan
1.	IV	5	2
2.	III	18	23
3.	II	0	2
JUMLAH		23	27

Data pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan tingkat pendidikan, Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana sebanyak 39 orang (78%), Diploma III sebanyak 2 orang (4%) Sekolah Menengah Atas sebanyak 9 orang (18%). Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai sumber daya manusia yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan.

D. Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis/program prioritas merupakan sasaran strategis pemerintah daerah yang dianggap signifikan dan relevan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu yang terkait dengan perencanaan RPJMD.

Berikut ini isu-isu strategis dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai instansi teknis daerah yang menjalankan pengelolaan keuangan, pengelolaan pendapatan dan pengelolaan barang milik daerah :

1. Pergeseran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) lebih bisa diminimalisir;
2. Perangkat Daerah dapat menjalankan anggaran kas yang telah direncanakan dengan tertib;
3. Pengajuan Pencairan SP2D dari PD dilakukan secara tertib agar Penerbitan SP2D optimal tepat waktu;

4. Pengajuan Pencairan SP2D dari Perangkat Daerah sesuai dengan persyaratan ketentuan sehingga tidak terjadi penolakan penerbitan SP2D;
5. Kemampuan dan pemahaman SDM dalam mengelola administrasi pencatatan akuntansi sesuai SAP dan penggunaan aplikasi keuangan berbasis Teknologi Informasi;
6. Kerugian daerah dapat diselesaikan secara bertahap;
7. Pengelolaan BMD dapat optimal dimana tingkat PD yang telah melakukan Pengelolaan BMD yang baik dan benar dapat mendekati 90%;
8. Pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah termasuk pada setiap unit kerja; dan
9. meningkatkan kesadaran masyarakat atau wajib pajak terhadap peranan pajak sebagai sumber dana pembangunan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 berpedoman pada dasar hukum sebagai berikut:

- 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengatur mekanisme perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja instansi pemerintah guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadi acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja serta pelaporan capaian kinerja.

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kinerja dan akuntabilitas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan perencanaan kinerja

yang selaras dengan visi, misi, serta tujuan strategis pemerintah daerah. Perencanaan kinerja ini diwujudkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja ini menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan serta pendapatan daerah. Melalui implementasi perencanaan kinerja yang sistematis dan berbasis hasil, Badan Pengelolaan KPD berupaya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, optimalisasi pendapatan daerah, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

A. Rencana Strategis

Rencana Stategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana

Strategis (Renstra) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merumuskan suatu proses pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tahun berjalan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau kemungkinan timbul.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar yakni **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”** yang dijabarkan dalam 3 (tiga) misi dan pada misi kesatu adalah *Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan*, ada 4 (empat) sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan;
3. Meningkatnya nilai SAKIP OPD; dan
4. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset milik daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun hubungan antara tujuan dan sasaran tersebut di atas digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

TUJUAN		SASARAN	
NO	URAIAN	NO	URAIAN
1.	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparansi, Akuntabel dan Partisipatif	1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel
2.		2.1	Meningkatnya kepercayaan

	Mewujudkan Reformasi Birokrasi BPKPD		masyarakat terhadap pelayanan
		2.2	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD
		2.3	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset milik daerah

a. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang memuat program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Adapun rumusan strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD);
2. Meningkatkan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah, penguatan sistem kelembangaan dan pengawasan, meningkatkan inovasi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi kinerja/hasil; dan
4. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan untuk mencapai tujuan dan sasaran dibutuhkan strategi. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar tujuan dan sasaran serta strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat diambil beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain:

1. Penginternalisasian pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas;
2. Peningkatan sarana dan prasarana kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
4. Peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
5. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan kinerja yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Fungsi Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai tolok ukur pencapaian strategis OPD, sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Kepala OPD berbasis data, dan berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban OPD kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memuat informasi tentang tugas, fungsi, kinerja utama, indikator kinerja utama disertai penjelasan dan sumber data yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke -						Akhir Period RPJMI
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparansi, Akuntabel dan Partisipatif	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		65,323	72,015	73,943	77,642	79,325	79,325
			Opini BPK atas Laporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2,85%	8,25%	5,48%	5,69%	3,46%	1,52%	1,52%
2.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi BPKPD	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks Reformasi Birokrasi BPKPD	CC	B	B	BB	BB	A	A
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan BPKPD		70,00	72,50	75,00	80,00	85,00	85,00

LAMP. BUKU/PENGLOLAAN KEUANGAN DAN PENGUMPILAN DAFTAR KEMERINTAHAN/KEPERAWAN MELAYU

	Meningkatnya nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD		B	B	BB	BB	BB	A	A
	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset milik daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

C. Rencana Kerja Tahunan

Dokumen rencana kerja (Renja) tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, kegiatan, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran. Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) dan menjadi acuan dalam menyusun perjanjian kinerja.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
NO	URAIAN	NO	URAIAN	
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	1.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
		1.2	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5,69
2.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan BPKPD	75,00

3.	Meningkatnya nilai SAKIP OPD	3.1	Nilai SAKIP OPD	BB
4.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset milik daerah	4.1	Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Sesuai

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026. Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya.

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan

tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada mulai eselon II, eselon III, dan eselon IV sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA BPKPD	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	WTP 5,69%
2	Meningkatnya Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan BPKPD	75,00
3	Meningkatnya nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	BB
4	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Sesuai

No Program

Anggaran

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
2. Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rp. 14.075.298.314

Rp. 140.741.017.440

Rp. 880.000.000

Rp. 2.304.620.646

Rp. 158.009.936.400

Benteng, 4 Januari 2024

BUPATI KEPULAUN SELAYAR

KEPALA BADAN,

H. MUH. BASLI ALI

Drs. MUHTAR, M.M.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19680104 199603 1 001

**PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/SOTA	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Rencana Kerja (Renja) dan Perubahannya 2. Pengumpulan Realisasi Anggaran Triwulan dan Semesteran dalam Aplikasi MANIA 3. Radarmasi Birekrasi (PMPRI) 4. Pengarusutamaan Gender (PUG) 5. Penyusunan Partisipasi Kerja	Rp15.000.000	Dokumen	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA	Rp15.000.000	Dokumen	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA	Rp15.000.000	Dokumen	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA	Rp15.000.000	Dokumen	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

		5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen Perubahan DPA	Rp15.000.000	Dokumen	Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1. Penyusunan LKPP	Rp15.000.000	Laporan	Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD
			2. Penyusunan LKPI			
		7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan LAKIP	Rp15.000.000	Laporan	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Rp7.084.794,200	Dokumen	Dokumen Penerimaan Gaji dan Tunjangan PNS
		2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp25.000.000	Dokumen	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp15.000.000	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp15.000.000	Laporan	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		5. Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Penyusunan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tidak Lajuat Pemeriksaan	Rp 15.000.000	Dokumen	Dokumen Bahan Tanggapan dan Tidak Lajuat Pemeriksaan

		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp.25.000.000	Laporan	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berlatarbelakang Tugas dan Fungsi	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berlatarbelakang Tugas dan Fungsi	Penyusunan Laporan Jumlah Pegawai yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Rp.66.510.000	Jumlah Pegawai	Tercapainya jumlah Pegawai yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyusunan Laporan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.56.000.000	Paket	Tercapainya jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyusunan Laporan Paket Bahan Logistik Kantor	Rp.78.490.000	Paket	Tercapainya Persentase Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
	3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyusunan Laporan Paket Baring Cetakan dan Penggandaan	Rp.15.000.000	Paket	Tercapainya jumlah Paket Baring Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.15.000.000	Dokumen	Tercapainya jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	5. Fasilitas Kunjungan Tamu	5. Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyusunan Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp.50.000.000	Laporan	Tercapainya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.200.000.000	Laporan	Tercapainya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Penyediaan Jasa Pembiayaan Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.3.620.513.654	Laporan	Tercapainya jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan

	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp2.469.940.400	Laporan	Tercapainya Jumlah Onag dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Peningkatkan Urutan Pemertintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pakok Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pakok Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Rp210.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas	Tercapainya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pejaknya
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyusunan Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp10.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercapainya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyusunan Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp25.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tercapainya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

KEPALA BADAN,

Benteng, 4 Januari 2024
SEKRETARIS BADAN,

Drs. MUHTAR, M.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680104 199603 1 001

HUSAIN, S.Sos.
Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19710623 199402 1 003

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA
BIDANG PENGELOLAAN
ANGGARAN DAERAH TAHUN 2024**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	1	Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS	Dokumen KUA dan PPAS
			2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	Penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
			3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	3	Penyusunan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen RKA-SKPD
			4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	4	Penyusunan Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	5	Penyusunan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen DPA-SKPD
			6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	6	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen Perubahan DPA-SKPD
			7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	7	Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
			8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	8	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

2. Pemimpin Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	9	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Rp 30,000,000.00	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	10	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Rp 30,000,000.00	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembinaan	11	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembinaan	Rp 20,000,000.00	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembinaan
	1	Analisis Perencanaan dan Penyelenggaraan Bantuan Keuangan	1	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyelenggaraan Bantuan Keuangan	Rp 120,174,873,000.00	Dokumen	Dokumen Hasil Analisis Perencanaan dan Penyelenggaraan Bantuan Keuangan
	2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp 8,131,807,000.00	Dokumen	Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
	3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	1	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Rp 2,183,257,440.00	Dokumen	Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

Benteng, 4 Januari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH,

Drs. MUHTAR, M.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680104 199603 1 001

NUR SOFYANSYAH, S.STP., M.AP
Pangkat : Penata Tk. I, III/d
NIP. 19920126 201206 1 001

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2. Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penyerbitan Anggaran Kas dan SPD 3. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 4. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaran dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 5. Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah	1. Penggunaan Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya 1. Penyusunan Surat Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 2. Penerbitan SPD 3. Penerbitan SP2D 1. Koordinasi dengan Bank BPD mengenai transaksi non tunai 2. Fasilitas Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah 1. Perhitungan utang piutang OPD tahun berjalan 2. Optimalisasi Kas 1. Penatausahaan Kas 2. Penatausahaan Gaji dan Tambahan Penghasilan pegawai	Rp11.000.000 Rp73.950.000 Rp34.500.000 Rp30.550.000 Rp70.000.000	Laporan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Kartu Kredit Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	Laporan Hasil Pengelolaan SLIPA Tahun Sebelumnya Dokumen SK Bupati Dokumen SPD Dokumen SP2D Dokumen Transaksi Non Tunai Kartu Kredit OPD Dokumen Perhitungan Utang Piutang OPD Tahun Berjalan Dokumen Penyeritaan Modal Pemda pada Bank Dokumen SP2D Dokumen Daftar Gaji

	6. Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1. Pembiayaan Daerah	Rp50.000.000	Dokumen	Dokumen rekapitulasi potongan dan berita acara rekonsiliasi
	7. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1. Koordinasi Pengelolaan DAK/DAK/DANA TRANSFER	Rp30.000.000	Laporan	Laporan belanja pegawai dan dokumen persyaratan penyaluran dana transfer
	8. Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 2. Penyusunan Laporan Aliran Kas 3. Penyusunan Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp46.300.000 Rp20.000.000 Rp50.000.000	BKU Laporan Laporan	BKU Laporan Aliran Kas Laporan
	9. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	1. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas SKPD 2. Rekonsiliasi pemungutan pajak SKPD melalui mekanisme GU/TU/LS	Rp 28.700.000 Rp60.000.000	Berita Acara Rekonsiliasi Konfirmasi NTPN	Berita Acara Rekonsiliasi Konfirmasi NTPN
	10. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	1. Verifikasi dokumen pencatran SKPD 2. Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Rp60.000.000 Rp100.000.000	Laporan Laporan	Laporan Laporan

Benteng, 4 Januari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN,

Drs. MUHTAR, M.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680104 199603 1 001

ZULFADLI, S.E.
Pangkat : Penata Tk. I, III/d
NIP. 19780612 200604 1 024

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELIARAN KAS DAERAH	1 KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELIARAN KAS DAERAH	1 PENYUSUNAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELIARAN KAS DAERAH	Rp 27.102.000,00	LAPORAN	LAPORAN HASIL KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELIARAN KAS DAERAH
			2 REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO	1 PENYUSUNAN LAPORAN HASIL, REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO, DAN BEBAN	Rp 26.895.000,00	DATA DAN DOKUMEN	DATA DAN DOKUMEN HASIL REKONSILIASI
			3 KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN	1 PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULAN DAN SEMESTERAN	Rp 46.556.000,00	LAPORAN	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULAN DAN SEMESTERAN
			4 KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	1 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERKONSOLIDASI	Rp 56.550.000,00	DATA DAN DOKUMEN	DATA DAN DOKUMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
			5 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	1 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN	Rp 400.004.000,00	RANPERDA DAN RANPERBUP	PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBD
			6 PENYUSUNAN TANGGAPAN/TINDAK LANJUT TERHADAP LHP BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	1 PENYUSUNAN DOKUMEN TANGGAPAN/TINDAK LANJUT TERHADAP LHP BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	Rp 20.000.000,00	DOKUMEN	DOKUMEN TANGGAPAN/TINDAK LANJUT TERHADAP LHP BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

				7	1	Rp 23.000.000,00	LAPORAN	LAPORAN HASIL KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH
				8	1	Rp 55.653.000,00	LAPORAN	LAPORAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
				9	1	Rp 50.000.000,00	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL, PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
				10	1	Rp 51.240.000,00	JUMLAH YANG MENGIKUTI PELATIHAN/	PENERAPAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN
				11	1	Rp 70.000.000,00	JUMLAH YANG MENGIKUTI	PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
				12	1	Rp 23.000.000,00	DATA DAN DOKUMEN	DOKUMEN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bonting, 4 Januari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,

KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH,

Drs. MUHTAR, M.M.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19680104 199603 1 001

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si.

Pangkat : Pembina
NIP. 19830525 200604 1 016

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Penyusunan Standar Harga	Penyusunan Dokumen Standar harga	Rp77.641.000	Dokumen	Jumlah Standar harga
			2 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp11.980.000	Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
			3 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Rp511.854.600	Laporan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun
			4 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Rp141.222.000	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah

		5	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp511.851.600	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
		6	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp12.778.000	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
		7	Optimalisasi Penguasaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Dokumen Hasil Optimalisasi Penguasaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	Rp32.056.400	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penguasaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

					Rp: 4.400.000	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
8	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					
9	Penatalaksanaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			Rp27.920.000	Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
10	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Orang yang Mengkuri Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			Rp27.432.000	25 Orang	Jumlah Orang yang Mengkuri Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
TOTAL					Rp1.369.224.600		

KEPALA BADAN,

Beneng, 4 Januari 2024
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH,

Drs. MUJIAR, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19680104 199603 1 0011

ANDI ARWIS, S.T., M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19710405 200604 1 029

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp768.709.137	Dokumen	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah
				Penyusunan Dokumen Target PAD		Dokumen	Tersusunnya target PAD
				Penyusunan Laporan Potensi Pajak Daerah		Laporan	Terseledanya data dan Potensi Pajak Daerah
			2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Penyusunan Dokumen Hasil Analis dan Pengembangan Pajak Daerah	Rp104.376.000	Dokumen	Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta
				Sosialisasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah		Laporan Hasil Kegiatan	Tersosialisasinya Perda No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan
			3 Penyuluhan dan Penyebarlu- san Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp72.000.000	Laporan	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
				Jumlah kegiatan Pelan Panutan Pajak		Laporan hasil Kegiatan	Terlaksananya Pekan Panutan Pajak Kabupaten Kepulauan
				Jumlah Desa/kelurahan di 11 kecamatan yang dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi Pemerintahan PBB-P2		Laporan hasil Kegiatan	Terlaksananya kegiatan money PBB di 11 Kecamatan
			4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp220.000.000	Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak

2. Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi		Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan obyekt pajak	Rp113.894.000	Dokumen
	2. Peningkatan jumlah wajib pajak terdata yang memiliki NPWP/D		Dokumen
	3. Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah		Laporan
	6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp69.660.000	Laporan
7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1. Jumlah SPPT PBB-P2 yang tersalurkan	Rp99.450.000	Dokumen SPPT-PBB
	2. Jumlah PBB-P2 dan BPHTB baru yang diverifikasi		Laporan
	3. Jumlah piutang PBB-P2 yang diverifikasi		laporan
8. Penetapan Wajib Pajak Daerah	1. Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Rp110.000.000	Dokumen Ketetapan

				2. Jumlah Perhitungan Penetapan untuk Penerbitan dan pendistribusian SKPD/SKRD		Dokumen Perhitungan	tersedianya Dokumen perhitungan penetapan untuk penerbitan SKPD/SKRD Tersedianya benda berharga/karcis retribusi yang
				3. Jumlah permintaan Perforasi dan Pengadministrasian Pengelolaan Benda-benda berharga/karcis retribusi		Kegiatan	
				1. Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti dan Jumlah dokumen pelayanan dan konsultasi yang dilaksanakan	Rp50.000.000	Laporan	Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak
				2. Jumlah dokumen pelayanan dan konsultasi yang dilaksanakan		Dokumen	Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
				1. Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp105.000.000	Dokumen	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
				2. Jumlah opd pengelola PAD yang direkonsiliasi dan dikonsolidasikan laporan pajak dan retribusinya		Laporan hasil Rekonsiliasi	Terlaksananya rekonsiliasi dan konsolidasi dengan OPD pengelola PAD
				1. Jumlah Dokumen Tertanggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Rp123.650.000	Dokumen SKPD piutang pajak	Terlaksananya Penagihan piutang Pajak Daerah
				2. Jumlah Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang didistribusikan kepada Wajib Pajak		Dokumen SPTPD	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada wajib pajak
				1. Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Rp50.000.000	Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
				1. Jumlah Dokumen Hasil	Rp40.500.000		Pemeriksaan dan

**PERJANJIAN KINERJA
KASUBAG. PROGRAM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Penyusunan Rencana Strategis dan Revisinya 2. Rencana Kerja (Rencana) dan Perubahannya 3. Pengalokasian Realisasi Anggaran Triwulan dan Semesteran dalam Aplikasi MANKA 4. Reformasi Birokrasi (PMSPR) 5. Pengarusutamaan Gender (PUG) 6. Penyusunan Perjanjian Kinerja	Rp15.000.000	Dokumen	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Penyusunan Dokumen RKA	Rp15.000.000	Dokumen	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA	Rp15.000.000	Dokumen	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA	Rp15.000.000	Dokumen	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD
			5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen Perubahan DPA	Rp15.000.000	Dokumen	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

			6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Penyusunan LPKD	Rp15.000.000	Laporan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				2. Penyusunan LKIP			
			7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan LAKIP	Rp15.000.000	Laporan	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

SEKRETARIS BADAN,

HUSAIN, S.Sos.
Pangkat: Pembina Muda Tk. I, IV/b
NIP. 19710623 199402 1 003

Benteng, 4 Januari 2023

KASUBAG. PROGRAM,

RITAWATI, S.S., M.M.
Pangkat : Pemata Tk. I, III/d
NIP. 19831229 201101 2 013

**PERJANJIAN KINERJA
KASUBAG KEUANGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Rp7.004.794.200	Dokumen	Dokumen Penyerahan Gaji dan Tunjangan PNS
			2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp15.000.000	Dokumen	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1. Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp15.000.000	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp15.000.000	Laporan	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			5. Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1. Penyusunan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Rp15.000.000	Dokumen	Dokumen Bahan Tanggapan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
			6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp15.000.000	Laporan	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

SEKRETARIS,

Benteng, 4 Januari 2024
KASUBAG. KEUANGAN,

HUSAIN, S.Sos
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP.19710623 199402 1003

WIDARNI SURUNG, S.Sos., M.M.
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19780214 200903 2 001

**PERJANJIAN KINERJA
KASUBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM TAHUN 2024**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Penyusunan Laporan Jumlah Pegawai yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Rp66.510.000	Jumlah Pegawai	Tercapainya Jumlah Pegawai yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi
		2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Penyusunan Laporan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp50.000.000	Paket	Tercapainya Jumlah Paket Peralatan dan Kantor yang di sediakan
			2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Penyusunan Laporan Paket Bahan Logistik Kantor	Rp78.490.000	Paket	Tercapainya Persentase Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
			3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Penyusunan Laporan Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp15.000.000	Paket	Tercapainya Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
			4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Penyusunan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp15.000.000	Dokumen	Tercapainya Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

			5	1	1	Penyusunan Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp50.000.000	Laporan	Tercapainya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
			6	1	1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp200.000.000	Laporan	Tercapainya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		2	1	1	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp3.620.513.634	Laporan	Tercapainya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
			2	1	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp2.469.990.480	Laporan	Tercapainya Jumlah Orang dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
		3	1	1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp210.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas	Tercapainya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
			2	1	1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp10.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercapainya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara

			3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Penyusunan Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.25.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tercapainya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
--	--	--	--	---	---	---------------	---	--

Benteng, 4 Januari 2024

SEKRETARIS BADAN,

KASUBAG. UMUM,
KEPEGAWAIAN & HUKUM,

HUSAIN, S.Sos., MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19710623 199402 1 003

MUHAMMAD ISWADI, S.M
Pangkat : Penata
NIP. 19771021 200701 1 018

PERJANJIAN KINERJA
KASUBID PENGENDALIAN DAN EVALUASI ANGGARAN DAERAH TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	PROGRAM PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH	1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Diverifikasi	-	Dokumen	Dokumen RKA-SKPD
			2) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	2 Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	-	Dokumen	Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	3 Jumlah dokumen DPA-SKPD yang Diverifikasi	-	Dokumen	Dokumen DPA-SKPD
			4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	4 Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	-	Dokumen	Dokumen Perubahan DPA-SKPD
			5) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun	-	Dokumen	Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
			6) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	-	Dokumen	Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH,

Benteng, 4 Januari 2024
KASUBID PENGENDALIAN DAN EVALUASI ANGGARAN DAERAH,

NUR SOFYANSYAH, S.STP., M.AP
Pangkat : Penata Tk. I, III/d
NIP. 19920126 201206 1 001

ULFIRAH MUTMAINNAH ASHARY,S.IP
Pangkat : Penata, III/c
NIP. 19960212 201708 2 001

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1 Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan Dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	1 Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 2 Penyusunan Laporan Aliran Kas 3 Penyusunan Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	Rp 46.300.000 Rp 20.000.000 Rp 50.000.000	Dokumen Dokumen Dokumen	Laporan Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran Laporan Buku Pembantu Bank Laporan Hasil Konfirmasi NTPN
			2 Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	1 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas SKPD	Rp 28.700.000	Dokumen	Kertas Kerja Rekonsiliasi, Berita Acara Rekonsiliasi
				2 Rekonsiliasi pemungutan pajak SKPD melalui mekanisme GU/TU/LS	Rp 60.000.000	Dokumen	Kertas Kerja Rekonsiliasi, Kertas Kerja Konfirmasi NTPN
			3 Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/	1 Verifikasi dokumen pencatatan SKPD 2 Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Rp 60.000.000 Rp 100.000.000	Dokumen Dokumen	Register dan Nota Konfirmasi Laporan Hasil Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah
					Rp 365.000.000		

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah,
Benteng, 4 Januari 2024
Kepala Sub. Bidang Penatausahaan
Bidang Perbendaharaan Daerah,

ZULFADLI, S.E.
Pangkat : Penata Tk. 1
NIP. 19780612 200604 1 024

JUFRINUR, SE
Pangkat : Penata Muda Tk.1, III/b
NIP. 198106072008031003

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Penatausahaan Kas	Rp156.350.000	Dokumen	Dokumen daftar penguji
				2 Penatausahaan Gaji		Dokumen	Dokumen Daftar Gaji dan SP2D
			2. Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Pembiayaan Daerah	Rp45.000.000	Dokumen	Dokumen rekapitulasi potongan dan berita acara rekonsiliasi
				1 Koordinasi Pengelolaan DAU/DAK/DAN A TRANSFER	Rp45.000.000	Laporan	laporan belanja pegawai dan dokumen persyaratan penyaluran dana transfer
			3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAN DAERAH,

Bonteng, 4 Januari 2024
KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN,

ZULFADLI, S.E.
Pangkat : Penata Tk. 1
NIP. 19780612 200604 1 024

E.M.M.A., S.E.
Pangkat : Penata
NIP. 19780518 201410 2 001

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	1 REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEAJIBAN, EKITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO	1 PENYUSUNAN LAPORAN HASIL REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO, DAN BEBAN	Rp 26.895.000,00	DATA DAN DOKUMEN	DATA DAN DOKUMEN HASIL REKONSILIASI
			2 PENYUSUNAN ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	1 PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	Rp 55.653.000,00	LAPORAN	LAPORAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
			3 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	1 PENYUSUNAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Rp 23.000.000,00	DATA DAN DOKUMEN	DOKUMEN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bonteng, 4 Januari 2024

KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH,

KEPALA SUB. BIDANG PELAPORAN, STATISTIK DAN PEMBINAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

NURSALIKHSAN, S.E., M.Ak., M
Pangkat : Pembina
NIP. 19830525 200604 1 016

JUMRIATILSE, M.M
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19770925 201001 2 002

PERJANJIAN KINERJA
KASUBBID PENATAUSAHAAN DAN PEMANFAATAN BMD
BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Penyusunan Standar Harga	-	Dokumen	Jumlah Standar harga
			2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
			3	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	Laporan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun
			4	Inventarisasi Barang Milik Daerah	-	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah
			5	Pengamanan Barang Milik Daerah	-	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
			6	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

		7	Optimalisasi Pengurusan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Dokumen Hasil Optimalisasi, Pengurusan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar		Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi, Pengurusan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
		8	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Laporan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
		9	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
		10	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	25 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
		TOTAL					

Benteng, 4 Januari 2024

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH,
KASURBID PENATAUSAHAAN DAN PEMANFAATAN BMD

ANDI ARWIS, S.T., M.Si.
Pangkat : Pembina
NIP. 19710405 200604 1 029

AGUNG PURNAMA, S.Sos
Pangkat : Penata III/c
NIP. 19830823 201001 1007

PERJANJIAN KINERJA
KASUBBID PENGAMANAN DAN PEMBINAAN BMD
BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Penyusunan Standar Harga	Penyusunan Dokumen Standar harga	-	Dokumen	Jumlah Standar harga
			2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
			3. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	-	Laporan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun
			4. Inventarisasi Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	-	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang
			5. Pengamanan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
			6. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
			7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtungan, Penunahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtungan, Penunahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	-	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtungan, Penunahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
			8. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
			9. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
			10. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	25 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Benteng, 4 Januari 2024

KASUBBID PENGAMANAN DAN
PEMBINAAN BMD

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH,

ANDI ARWIS, S.T., M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19710405 200604 1 029

ANDI FARIDH ZAINAL
Pangkat : Penata Tk.I, III/d
NIP. 19730703 200711 03

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Memberikan pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah	Rp 50.000.000	Laporan	Laporan Hasil pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah
			2 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	2 Penyusunan Laporan kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah	Rp105.000.000	Laporan	Laporan Hasil kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah
			3 Penagihan Pajak Daerah	3 Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah sesuai Dokumen SPTPD yang didistribusikan kepada Wajib Pajak	Rp123.650.000	Laporan	Laporan Hasil Penagihan Pajak Daerah
			4 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 Memberikan Pelayanan terkait Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Rp 50.000.000	Laporan	Laporan Hasil Pelayanan terkait Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Bentang, 4 Januari 2024
KASUBID. PENGEMBANGAN DAN
PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH

KABID. PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH,

AKHMAD ANSAR, S.T.,M.M.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19840328 201407 1 001

ASPA, S.Sos
Pangkat : Penata
NIP. 19821228 200701 1 004

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Penyusunan Laporan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 48.500.000	Laporan	Laporan Hasil Penyusunan Laporan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
			2 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	1 Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 378.411.509	Laporan	Laporan Hasil Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah

Bontung, 4 Januari 2024

KABID. PENGELOLAAN PENDAPATAN
PEMBINAAN PENDAPATAN DAERAH

KASUBID. PENGENDALIAN DAN DAERAH,

AKHMAD ANSAR, S.T.,M.M.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19840328 201407 1 001

AKHMAD JUNAEDI, S.Sos.,M.M
Pangkat : Pemata Tk. I
NIP. 19800307 200604 1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan di uraikan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Reviu Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2021-2026. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima dalam rangka pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* yang mana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Oleh karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dan pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dan
2. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dinilai melalui pengukuran pencapaian target Renstra 2021-2026. Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyelenggarakan beberapa kegiatan atau aktifitas sesuai dengan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang merupakan bagian dari Rencana Strategis.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dijabarkan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
NO	URAIAN	NO	URAIAN	
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	1.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
		1.2	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5,69%
2.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	2.1	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan BPKPD	75,00
3.	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	1.1	Nilai SAKIP OPD	BB
4.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset milik daerah	2.1	Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Sesuai

Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang tata usaha pelaksana keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah telah melaksanakan beberapa capaian kinerja dengan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukurnya dengan hasil sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
			2023			2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opini BPK terhadap Laporan keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	100%	WTP		
2	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	5,48%	5,85%	100%	5,69%	2,03%	2,03%
3	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan BPKPD	Persen	72,50	78,01	100%	75,00		
4	Nilai SAKIP OPD	Nilai	B	B	61,02%	BB		
5	Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Sesuai/ Tidak Sesuai	Sesuai	Sesuai	100%	Sesuai	Sesuai	100%

Indikator Kinerja Utama (IKU) keempat Nilai Sakip Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan Indikator

Kinerja Utama (IKU) pertama Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan dijabarkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun anggaran berikutnya hal tersebut disebabkan karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024 masih dilakukan audit oleh BPK-RI sementara Nilai SAKIP di reviu oleh Inspektorat Daerah pada awal tahun 2025 sehingga yang terjabarkan pada LAKIP tahun 2024 adalah nilai tahun sebelumnya yaitu tahun 2023.

Indikator Kinerja Utama (IKU) kedua adalah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 terealisasi sebesar 2,03% dengan kata lain ada peningkatan meskipun tidak signifikan namun jika dilihat dari target sebesar 5,69% tidak mencapai target hal ini disebabkan atau di pengaruhi oleh karena adanya perubahan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa Retribusi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak lagi di pungut.

B. Analisa Capaian Kinerja

Pada akhir tahun anggaran 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah merealisasikan seluruh kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Bupati dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun seluruh capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikelompokkan dan dianalisa sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama (IKU 1)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
			2023			2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100%	WTP		

Berdasarkan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan maka perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri.

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lingkup Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemeriksaan Atas Tanggungjawab Keuangan Negara. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan

dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Entitas Pemeriksa Laporan Keuangan pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Dalam kaitannya dengan tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan gabungan dari seluruh Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun anggaran 2024 yang telah disusun diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 2025 oleh Bapak Bupati Kepulauan Selayar kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilaksanakan Pemeriksaan atau diaudit pengelolaan keuangan Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Selayar, yang nantinya akan diberikan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.1. Analisa Perbandingan Realisasi terhadap Target Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 32.A/LHP/XIX.MKS/05/2024 tanggal 25 Mei 2024, hasil Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan hasil opini yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut maka target Sasaran Kinerja ke-1 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023 berupa opini WTP dengan persentase 100% tercapai.

Dalam rangka pemenuhan Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Perangkat Daerah, penghitungannya dilakukan dengan

memberikan point pada masing-masing opini. Target point ditetapkan sebagai berikut :

Apabila mendapat opini “Tidak Wajar”, maka point yang diberikan adalah 1 (satu);

Apabila mendapat opini “Disclaimer”, maka point yang diberikan adalah 2 (dua);

Apabila mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP), maka point yang diberikan adalah 3 (tiga); dan

Apabila mendapat opini “ Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP), maka point yang diberikan adalah 4 (empat).

Berdasarkan target point tersebut di atas, maka dapat dilakukan pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Target point} \times 100}{\text{Target Point opini}} = \text{Persentase Realisasi}$$

$$\frac{4 \text{ (empat)} \times 100}{4} = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas dapat dilakukan perhitungan capaian yaitu :

$$\frac{\text{Persentase Realisasi} \times 100}{\text{Persentase target}} = \text{Persentase capaian realisasi}$$

$$\frac{100\% \times 100}{100\%} = 100\%$$

1.2. Faktor Pendukung Keberhasilan

Dengan terlaksananya output dari setiap kegiatan di atas yang mendukung pencapaian opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, dengan pendukung capaian kinerja sebagai berikut:

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kebijakan pimpinan dalam mengupayakan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
3. Adanya upaya seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan kualitas LK-OPD-nya masing-masing.

1.3. Faktor Penghambat Keberhasilan

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 menjelaskan bahwa masih adanya kelemahan baik pada sistem pengendalian Intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4. Solusi (Rekomendasi)

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya untuk menindaklanjuti kelemahan yang ada dan juga berusaha meningkatkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

2. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama (IKU 2)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
			2023			2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	5,48%	5,85	5,85	5,69%	2,03%	2,03%

Definisi Pendapatan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Adapun jenis Pendapatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;

- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

a. Analisa Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp.109.660.630.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 81.362.854.816,54 atau dengan persentase sebanyak 74,20% dan terdapat selisih kurang sebesar Rp. 28.297.775.183,46. Berdasarkan realisasi tersebut, capaian target indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencapai target dengan persentase realisasi sebesar 2,03% dari persentase target sebesar 5,69%. Hal ini disebabkan karena tingginya target penerimaan sementara ada sumber PAD yang

kewenangannya beralih ke Pemerintah Provinsi dan karena adanya perubahan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa Retribusi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak lagi di pungut.

Adapun rincian rencana dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		%
		TARGET	REALISASI	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	109.660.630.000,00	81.362.854.816,54	74,20
1.	Pajak daerah	28.271.091.400,00	13.607.805.818,00	48,13
2.	Retribusi daerah	47.922.113.000,00	47.124.890.526,00	98,34
3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.778.500.000,00	12.005.751.676,20	93,95
4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	20.688.925.600,00	8.624.406.794,34	41,69

Sumber : LRA-PAD BPKPD per 31 Desember 2024

1. Hasil Pajak Daerah

Target pendapatan dari sektor Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 sebesar Rp. 28.271.091.400,00 dengan

6	Pajak Hiburan	35.525.000,00	20.504.072,00	15.020.928,00	57,72
7	Pajak PBBP2	6.752.316.400,00	3.482.259.371,00	3.270.057.029,00	51,57
8	Pajak Air Tanah	215.750.000,00	18.926.240,00	196.823.760,00	8,77
9	Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan	1.300.000.000,00	860.366.462,00	439.633.538,00	66,18

2. Hasil Retribusi Daerah

Target pendapatan dari sektor retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 sebesar Rp. 47.922.113.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 47.124.890.526,00 atau mencapai 98,34% yang bersumber dari komponen retribusi daerah yaitu :

1. Capaian Retribusi Jasa Umum target Rp. 45.315.769.000,00 dengan realisasi Rp. 45.818.795.747,00 atau melampaui target dengan persentase 101,11% hal ini dipengaruhi oleh tingginya realisasi pada komponen retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis sebesar 113,04% dan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas sebesar 99,14%.

2. Capaian Retribusi Jasa Usaha mencapai persentase sebesar 52,54% dengan target Rp.2.106.344.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.106.598.560,00. Adapun komponen yang mempengaruhi adalah retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang persentasenya hanya 9,80%. Akan tetapi terdapat 2 (dua) penerimaan retribusi yang melewati target pada tahun 2024 adalah retribusi penyewaan bangunan sebesar 128,33% dan mencapai target sebesar 100% adalah retribusi pemakaian alat selam.
3. Capaian Retribusi Perizinan Tertentu hanya mencapai persentase 39,90% dan tidak mencapai target dari total target sebesar Rp.500.000.000,00 dan yang terealisasi sebesar Rp. 199.496.219,00 dan kompone yang mempengaruhi capaian realisasi tersebut yaitu rendahnya capaian pada retribusi pemberian izin mendirikan bangunan.

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor retribusi daerah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2024

URAIAN		TARGET	REALISASI	%
HASIL RETRIBUSI DAERAH		47.922.113.000,00	47.124.890.526,00	98,34
Retribusi Jasa Umum		45.315.769.000,00	45.818.795.747,00	101,11
	R. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	515.000.000,00	491.527.500,00	95,44
	R. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	360.500.000,00	155.355.000,00	43,09
	R. Pelayan Kesehatan di tempat Pelayanan Kesehatan	44.410.630.000,00	45.160.933.247,00	101,69
	R. Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0	0	
	R. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	11.639.000,00	11.000.000,00	94,51
	R. Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	18.000.000,00	0	
Retribusi Jasa Usaha		2.106.344.000,00	1.106.598.560,00	52,54
	R. Pemakaian Kekayaan Daerah	75.000.000,00	96.250.000,00	128,33
	R. Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	500.000.000,00	343.348.100,00	68,67
	R. Penyediaan Tempat Pelelangan	250.000.000,00	69.201.700,00	27,68
	R. Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	25.000.000,00	0	
	R. Pelayanan Tempat Khusus Parkir	70.344.000,00	0	
	R. Tempat Penginapan/Pasanggarahan/Villa	265.000.000,00	25.980.000,00	9,80

	R. Pelayanan Kepelabuhanan	650.000.000,00	422.046.760,00	64,93
	R. Pemakaian Kendaraan Bermotor	119.500.000,00	41.300.000,00	34,56
	R. Pemakaian Laboratorium	24.500.000,00	13.075.000,00	53,37
	R. Pemakaian Alat	50.000.000,00	39.673.000,00	79,34
	R. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	0	0	
	Retribusi Perizinan Tertentu	500.000.000,00	199.496.219,00	39,90
	R. Izin Mendirikan Bangunan	500.000.000,00	199.496.219,00	39,90

Sumber LRA-PAD BPKPD per 31 Desember 2024

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada bagian laba yang di bagikan kepada pemerintah daerah (*deviden*) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) realisasi penerimaannya sebesar 94,84% atau sebesar Rp 12.005.751.676,20 tidak mencapai target dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 12.658.500.000,00, dan tidak ada realisasi penerimaan pada bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Bidang Air Minum) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 120.000.000,00. Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan Tahun 2024

URAIAN		TARGET	REALISASI	%
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		12.778.500.000,00	12.005.751.676,20	93,95
	Bagian Laba Yang Di Bagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD BPR (Lembaga Keuangan)	12.658.500.000,00	12.005.751.676,20	94,84
	Bagian Laba Yang Di Bagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Bidang Air Minum)	120.000.000,00	-	-

Sumber LRA-PAD per 31 Desember 2022

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Sektor lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah realisasi penerimaannya adalah sebesar 44,33% atau sebesar Rp 9.171.286.735,34 tidak mencapai target dari target yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp 20.688.925.600,00.

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah dapat dilihat pada tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang Sah Tahun 2024

URAIAN		TARGET	REALISASI	%
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH		20.688.925.600,00	9.171.286.735,34	44,33
	Penerimaan Jasa Giro	1.500.000.000,00	986.585.072,97	65,77
	Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	7.257.167.200,00	1.057.268.498,33	14,57
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	11.931.758.400,00	7.127.433.164,04	59,73

Sumber LRA-PAD BPKPD per 31 Desember 2024

Faktor penghambat keberhasilan

1. Kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi masih rendah; dan
2. Koordinasi penanganan pendapatan secara menyeluruh dan terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah masih rendah.

Faktor Pendukung Keberhasilan dan Rekomendasi

Faktor pendukung peningkatan laju pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan karakteristik dan potensinya adalah bersumber pada:

1. Pengembangan sektor pariwisata

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi wisata pantai yang signifikan dapat menjadi salah satu upaya pengembangan dan pendongkrak laju pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar;

2. Pertumbuhan ekonomi daerah

Pertumbuhan ekonomi yang positif dapat meningkatkan basis pajak dan retribusi daerah, upaya pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi akan berdampak positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. Investasi Pemerintah Daerah

Investasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar;

4. Optimalisasi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Pengelolaan yang optimal dan peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
5. Peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerah yang efisien termasuk optimalisasi belanja modal dan operasi dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

3. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan

Tabel 3.10

Indikator Kinerja Utama (IKU 3)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%
			2023			2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan BPKPD	Persen	72,50	78,01	100%	75,00		

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan alat ukur untuk menilai kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah termasuk, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) biasanya dinyatakan dalam skala 0-100 dan jika semakin tinggi nilainya maka menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih baik terhadap pelayanan yang diberikan.

IKM memuat sembilan unsur penting, yakni: (1) kesesuaian persyarat layanan, (2) kemudahan prosedur pelayanan, (3) kecepatan waktu dalam memberikan layanan, (4) kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, (5) kesesuaian produk pelayanan dengan standar pelayanan, (6) kompetensi/kemampuan petugas, (7) perilaku petugas terkait kesopanan dan keramahan, (8) kualitas sarana dan prasarana, serta (9) penanganan pengaduan pengguna layanan.

Data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan tabel matriks dan grafik untuk menggambarkan kecenderungan dari persepsi masyarakat yang nantinya akan menyajikan informasi tentang indeks kepuasan masyarakat berdasarkan penyelenggaraan urusan setiap perangkat daerah dan secara kumulatif akan

membentuk IKM pemerintah daerah untuk tahun yang bersangkutan. Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat dapat diketahui kinerja unit pelayanan dan kualitas setiap Perangkat Daerah pada tabel 3.11 berikut ini :

Tabel 3.11
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber Data: Permen PANRB No. 14/2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat diketahui kinerja kualitas layanan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) ke 3 (ketiga) Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan BPKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tabel 3.12 berikut ini :

Tabel 3.12
Kualitas Layanan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Konv. IKM	Mutu Layanan	Kinerja Unit Layanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	75.8	C	Kurang Baik
2	Kemudahan prosedur/alur pelayanan	75.0	C	Kurang Baik
3	Waktu pelayanan	73.3	C	Kurang Baik
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	98.3	A	Sangat Baik
5	Kesesuaian Jenis layanan	75.8	C	Kurang Baik
6	Kompetensi/Kemampuan petugas dalam pelayanan	76.7	B	Baik
7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	77.5	B	Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	74.2	C	Kurang Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	75.8	C	Kurang Baik
Rata-rata Nilai Unsur Pelayanan		78.1	B	Baik

Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor pendukung keberhasilan IKM Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat pada unsur kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan tidak membebankan masyarakat dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan.

Faktor penghambat keberhasilan

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dan kemudahan prosedur/alur pelayanan;
2. Waktu pelayanan dan kesesuaian jenis layanan; dan
3. Kualitas sarana dan prasarana dan penanganan pengaduan.

Solusi (Rekomendasi)

Berdasarkan nilai IKM persetiap unsur layanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendappatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, meningkatkan waktu pelayanan, prosedur dan alur pelayanan perlu lebih disederhanakan, persyaratan pelayanan harus lebih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesesuaian jenis layanan dan peningkatan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan.

4. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan

Tabel 3.13
Indikator Kinerja Utama (IKU 4)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%
			2023			2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai SAKIP OPD	Nilai	B	B	60,90	BB		

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari fungsi yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja disusun dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian singkat Organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang telah ditetapkan;
3. Pengukuran Kinerja;
4. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Laporan Kinerja disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Salah satu faktor utama dalam

menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja guna menjamin peningkatan dalam pelayanan publik. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan yang ditargetkan.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan terhadap sistem akuntabilitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar oleh Inspektorat Daerah Kepulauan Selayar berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yaitu:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja; dan
4. Evaluasi Internal;

Analisa Perbandingan Realisasi terhadap Target Tahun 2023

Berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kepulauan Selayar, hasil yang didapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar atas Sistem Akuntabilitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 adalah 60,90 dengan predikat B (baik) dengan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja : 18,30
- b. Pengukuran Kinerja : 18,30
- c. Pelaporan Kinerja : 9,30
- d. Evaluasi Internal : 15,00

Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2023, Indikator Kinerja Utama (IKU) 4 (empat) Nilai SAKIP OPD terealisasi di angka persentase 60,90 yang berarti mencapai target IKU tahun 2023 adalah B (baik) dengan kriteria yaitu akuntabilitasnya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan sebagai informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, namun demikian

masih memerlukan banyak perbaikan untuk penyempurnaannya. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar disebabkan antara lain pada:

1. aspek Perencanaan Kinerja dokumen perencanaan kinerja belum memenuhi standar yang baik dengan ukuran kinerja yang SMART.
2. aspek pengukuran kinerja belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang disahkan oleh pimpinan.
3. aspek pelaporan kinerja disebabkan juga oleh karena belum dipublikasikan secara tepat waktu melalui website Pemda/OPD atau media sosial lainnya dan
4. aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal bahwa implelementasi SAKIP telah meningkat, namun rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang diberikan belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

Faktor Penghambat Keberhasilan

Masih terdapat beberapa kelemahan dari segi Pengukuran Kinerja yaitu dalam hal pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran.

Solusi (Rekomendasi)

Berdasarkan faktor keberhasilan dan hambatan tersebut di atas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana direkomendasikan oleh Tim Evaluasi AKIP antara lain dari aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal agar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset milik daerah.

Tabel 3.14
Indikator Kinerja Utama (IKU 5)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
			2023			2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	100%	Sesuai	Sesuai	100%

Pelaporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari fungsi yang dipercayakan kepada instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah secara profesional, partisipatif dan akuntabel sebagai bagian yang tidak terpisahkan demi terwujudnya *"Good Governance"*. Hal terpenting yang diperlukan dalam pelaporan keuangan adalah memenuhi prinsip tepat waktu dan penyusunannya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau *System Analysis and Product in Data Processing* merupakan sebuah aplikasi yang

digunakan untuk mengolah data yang digunakan instansi pemerintah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga penyajian data lebih akurat, efektif dan efisien.

Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual, laporan keuangan yang dibuat oleh entitas pelaporan yaitu Laporan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas dan Laporan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan formula wajib yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU 5) yaitu Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sejalan dengan tujuan dan sasaran strategis ke 4 (empat) yaitu meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada tahun anggaran 2024 terealisasi 100% atau mencapai target.

C. Realisasi Keuangan

Analisis capaian keuangan dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri atas LRA, NERACA, dan Catatan Atas Laporan Keuangan serta diterapkannya sistem dan prosedur akuntansi secara berkesinambungan.

Total Pagu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 166.993.740.900,00 serapan realisasi sebesar Rp 157.053.092.431,00 atau dengan persentase sebanyak 94,05%. Adapun uraian belanja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Belanja Langsung	22.019.317.462,-	20.881.883.651,-	94,83
1.	Belanja Pegawai	8.255.311.246,-	7.448.308.422,-	90,22
2.	Belanja Barang dan Jasa	13.410.841.616,-	13.086.775.229,-	97,58
3.	Belanja Modal	353.164.600,-	346.800.000,-	98,19

Dari total pagu yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2024 sebesar Rp 166.993.740.900,00 selanjutnya dialokasikan untuk merealisasikan 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan terjabarkan dalam 90 (sembilan puluh) sub kegiatan.

Alokasi pagu anggaran dan realisasi per program tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Penyerapan terhadap Pagu Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah per Program

PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.863.388.814,-	12.678.814.240,-	98,57
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	150.345.731.440,-	141.355.014.741,-	94,02
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.080.000.000,-	1.023.722.509,-	94,79
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.704.620.646,-	1.995.540.941,00	73,78
JUMLAH TOTAL	166.993.740.900,-	157.053.092.431,-	94,05

Terlihat pada tabel 3.11 realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 157.053.092.431,00 atau 94,05%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yakni tahun 2023 dan tahun 2024, penyerapan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	155.762.235.893,00	166.993.740.900,00
Realisasi	151.608.284.888,00	157.053.092.431,00
Persentase (%)	97,33%	94,05%

Sedangkan realisasi target anggaran per program per kegiatan dan per sub kegiatan di uraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.18
Realisasi Target Anggaran per Program per Kegiatan dan per Sub kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA		INDIKATOR KINERJA HASIL/ KELUARAN		%
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.863.388.814	12.678.814.240			98,56%
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	145.000.000	144.419.700	10 Dokumen	10 Dokumen	99,59%
1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	29.875.700	3 Dokumen	3 Dokumen	99,58%
2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	15.000.000	14.909.000	1 Dokumen	1 Dokumen	99,39%
3	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	27.500.000	27.379.500	1 Dokumen	1 Dokumen	99,56%
4	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	15.000.000	14.960.200	1 Dokumen	1 Dokumen	99,73%
5	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>					

	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	27.500.000	27.411.200	1 Dokumen	1 Dokumen	99,67%
6	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	14.931.500	2 Laporan	2 Laporan	99,54%
7	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	15.000.000	14.952.600	1 Laporan	1 Laporan	99,68%
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.948.930.700	4.815.499.972	39 Dokumen	39 Dokumen	97,30%
1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	4.843.930.700	4.716.202.172	59 Orang/Bln	59 Orang/Bln	95,09%
2	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	32.365.300	31.647.000	12 Dokumen	12 Dokumen	97,36%
3	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18.087.700	17.585.000	1 Dokumen	1 Dokumen	97,22%
4	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	15.443.600	12.910.100	2 Laporan	2 Laporan	83,59%

5	<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	15.443.600	14.013.700	1 Dokumen	1 Dokumen	90,74%
6	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23.659.800	23.142.000	24 Laporan	24 Laporan	97,81%
C	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	241.022.000	239.903.460			99,53%
1	<i>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60.000.000	60.000.000	120 Paket	120 Paket	100%
2	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah pegawai berdasarkan tupoksi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22.022.000	21.836.260	5 Orang	5 Orang	99,15%
3	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	159.000.000	158.067.200	30 Orang	30 Orang	99,41%
D	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	824.176.650	810.359.181	100%	100%	98,32%
1	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>					

	Indikator Kinerja : Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	236.132.600	233.019.600	12 paket	12 paket	98,68%
2	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	135.724.050	134.953.200	1 paket	1 paket	99,43%
3	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	15.000.000	8.633.500	1 paket	1 paket	57,55%
4	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10.220.000	8.525.000	1 Dokumen	1 Dokumen	83,01%
5	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.000.000	74.886.000	1 Laporan	1 Laporan	99,01%
6	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	352.100.000	350.341.881	1 Laporan	1 Laporan	99,02%
E	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	121.862.000	117.700.000			99,96%
1	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	99.462.000	95.620.000	4 Unit	4 Unit	91,07%
2	<i>Pengadaan Meubel</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah unit meubel yang diadakan	22.400.000	22.080.000	32 Unit	32 Unit	98,57%
F	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.613.343.940	5.321.472.045	100%	100%	94,80%

1	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3.720.557.984	3.706.922.609	3 Laporan	3 Laporan	99,63%
2	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2.448.090.480	2.438.979.460	1 Laporan	1 Laporan	93,63%
G	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	413.749.000	405.029.858	100%	100%	97,89%
1	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	303.660.000	297.210.858	80 Unit	80 Unit	97,87%
2	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	11.650.000	9.380.000	36 Unit	36 Unit	80,51%
3	<i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	98.439.000	98.439.000	1 Unit	1 Unit	100%
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	150.345.731.440	141.355.014.741			92,02%
A	Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	936.000.000	921.230.787			98,42%
1	<i>Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS</i>					

	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang di susun	118.600.000	115.591.000	2 Dokumen	2 Dokumen	97,46%
2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang di susun	118.600.000	117.455.126	2 Dokumen	2 Dokumen	99,03%
3	<i>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	28.145.000	27.764.300	45 Dokumen	45 Dokumen	98,64%
4	<i>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	20.000.000	19.916.300	45 Dokumen	45 Dokumen	99,58%
5	<i>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	20.000.000	19.995.800	45 Dokumen	45 Dokumen	99,98%
6	<i>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	20.000.000	19.995.800	45 Dokumen	45 Dokumen	99,98%
7	<i>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	271.855.000	271.052.537	3 Dokumen	3 Dokumen	99,70%
8	<i>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	140.000.000	137.576.400	3 Dokumen	3 Dokumen	98,27%

9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					
	Indikator Kinerja: Jumlah dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	0	0			
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan					
	Indikator Kinerja: Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan Anggaran Pendapatan	79.400.000	78.428.900	12 Dokumen	12 Dokumen	98,77%
11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	79.400.000	76.043.169	12 Dokumen	12 Dokumen	95,77%
12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	40.000.000	37.411.455	12 Dokumen	12 Dokumen	93,53
B	Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	3.423.308.000	3.258.461.928			99,88%
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah	53.030.000	51.332.000	12 Dokumen	12 Dokumen	96,80%
2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					
	Indikator Kinerja: Jumlah laporan hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	13.400.000	12.293.800	1 Laporan	1 Laporan	91,74%
3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					
	Indikator Kinerja: Jumlah dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	73.950.000	72.382.900	2 Dokumen	2 Dokumen	97,88%
4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah					

	Indikator Kinerja: Jumlah dokumen hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	48.066.500	46.784.800	1 Dokumen	1 Dokumen	97,33%
5	<i>Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	73.903.500	72.864.426	12 Dokumen	12 Dokumen	98,59%
6	<i>Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan Bank	57.036.000	54.640.125	12 Dokumen	12 Dokumen	95,80%
7	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah laporan realisasi penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran	2.872.580.000	2.740.274.540	12 Laporan	12 Laporan	95,40%

	Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)					
8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas					
	Indikator Kinerja: Jumlah dokumen hasil koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	30.550.000	28.702.698	12 Dokumen	12 Dokumen	93,95%
9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait					
	Indikator Kinerja: Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	113.684.000	100.959.339	2 Dokumen	2 Dokumen	88,80%
10	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					
	Indikator Kinerja: Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	87.108.000	78.227.300	30 Orang	30 Orang	98,05%
C	Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.000.000.000	993.613.246		100%	99,36%
1	Koordinasi Pelaksana Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah					
	Indikator Kinerja: Jumlah laporan hasil koordinasi Pelaksanaan akuntansi	260.000.000	77.020.800	1 Laporan	1 Laporan	29,62%

	penerimaan dan pengeluaran kas daerah					
2	<i>Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	350.000.000	81.755.066	12 Dokumen	12 Dokumen	23,36%
3	<i>Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	250.000.000	89.103.080	1 Laporan	1 Laporan	35,64%
4	<i>Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	220.000.000	56.377.700	3 Laporan	3 Laporan	25,63%
5	<i>Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peratnggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Rancangan Perda Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peratnggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1.955.000.000	399.418.000	1 Dokumen	1 Dokumen	20,43%

6	<i>Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	275.000.000	18.255.300	1 Dokumen	1 Dokumen	66,38%
7	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan penyelesaian Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Kerugian Daerah	575.000.000	22.936.900	5 Dokumen	5 Dokumen	39,90%
8	<i>Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	225.000.000	55.388.100	1 Dokumen	1 Dokumen	24,62%
9	<i>Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100.000.000	49.578.600	1 Dokumen	1 Dokumen	49,58%
10	<i>Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	100.000.000	51.191.700	30 Orang	30 Orang	51,19%
11	<i>Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah BLUD Kabupaten/ Kota yang dibina	100.000.000	69.894.200	1 Lembaga	1 Lembaga	69,89%

12	<i>Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah laporan statistik keuangan pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota	210.000.000	22.693.800	1 Laporan	1 Laporan	10,81%
D	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	144.986.423.440	136.181.708.780			93,93%
1	<i>Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	5.000.000.000	0	1 Laporan	1 Laporan	0%
2	<i>Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	130.564.387.000	128.162.276.995	1 Laporan	1 Laporan	98,16%
3	<i>Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	7.238.779.000	6.378.386.300	1 Laporan	1 Laporan	88,11%
4	<i>Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	2.183.257.440	1.641.045.485	1 Laporan	1 Laporan	75,16%
E	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					
1	<i>Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0			

III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.080.000.000	1.023.722.509			94,78%
A	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.080.000.000	1.023.722.509			94,78%
1	<i>Penyusunan Standar Harga</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Standar Harga yang di susun	102.641.000	97.491.600	1 Dokumen	1 Dokumen	94,98%
2	<i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah rencan kebutuhan barang milik daerah	17.499.100	14.098.300	45 Dokumen	45 Dokumen	80,56%
3	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	87.400.000	81.967.337	1 Laporan	1 Laporan	93,78%
4	<i>Inventarisasi Barang Milik Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah LHI Barang Milik Daerah	261.863.000	253.583.001	1 Laporan	1 Laporan	96,83%
5	<i>Pengamanan Barang Milik Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	467.980.600	452.225.671	1 Laporan	1 Laporan	96,63%
6	<i>Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah laporan hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	18.511.900	15.406.800	1 Laporan	1 Laporan	83,22%
7	<i>Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik daerah	32.056.400	29.583.300	100 Dokumen	100 Dokumen	92,28%

8	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					
	Indikator Kinerja : Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	21.986.000	14.784.400	4 Laporan	4 Laporan	67,24%
9	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	22.630.000	20.451.800	1 Laporan	1 Laporan	90,37%
10	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					
	Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	47.432.000	44.130.300	25 Orang	25 Orang	93,03%
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.888.861.497	1.995.540.941			51,31%
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.888.861.497	1.995.540.941			51,31%
1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah	768.709.137	378.568.622	12 Dokumen	12 Dokumen	49,24%
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen hasil analisa Pajak Daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	104.376.000	97.567.395	2 Dokumen	2 Dokumen	93,47%
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					
	Indikator Kinerja : Jumlah laporan pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	72.000.000	58.292.300	1 Laporan	1 Laporan	80,96%
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak					

LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

	<i>Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	220.000.000	51.463.900	4 Unit	4 Unit	23,39%
5	<i>Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan hasil pendataan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek pajak dan wajib pajak daerah	513.864.000	513.103.700	20 Laporan	20 Laporan	99,85%
6	<i>Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	69.660.000	64.912.300	1 Laporan	1 Laporan	93,18%
7	<i>Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOPnya	90.450.000	87.176.873	20 Obyek Pajak	20 Obyek Pajak	96,38%
8	<i>Penetapan Wajib Pajak Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : jumlah dokumen penetapan Pajak daerah	110.000.000	109.726.900	1 Dokumen	1 Dokumen	99,75%
9	<i>Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	50.000.000	47.901.800	100 Layanan	100 Layanan	95,80%
10	<i>Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah di lakukan penelitian dan verifikasi	105.000.000	101.072.901	1 Dokumen	1 Dokumen	96,25%
11	<i>Penagihan Pajak Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	123.650.000	121.720.300	1 Dokumen	1 Dokumen	98,43%
12	<i>Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</i>					

	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	50.000.000	45.393.100	1 Dokumen	1 Dokumen	90,78%
13	<i>Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	48.500.000	47.194.700	1 Dokumen	1 Dokumen	97,30%
14	<i>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	378.411.509	271.446.150	1 Laporan	1 Laporan	71,73%

Sumber : Realisasi Fisik dan Keuangan per 31 Desember 2024 dan DPA-P TA 2024

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran masing-masing kegiatan per program rata-rata tercapai 98%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan dana tahun anggaran 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan yang signifikan. Terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang penyerapannya 0% yaitu sub kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi hal ini disebabkan karena anggaran sub kegiatan yang dimaksud merupakan Dana Transfer dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 telah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun.

Laporan ini mencerminkan capaian kinerja serta evaluasi terhadap kualitas kinerja seluruh elemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Capaian kinerja yang telah diperoleh diharapkan menjadi dasar evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan serta optimalisasi pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang. Usaha dan kerja keras yang dilakukan untuk mencapai tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui program, kegiatan dan sub kegiatan serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari perencanaan

penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, akuntansi pelaporan dan evaluasi yang efektif.

4.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas Kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan, dengan capaian kinerja yang menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Akuntabilitas dan Transparansi

Proses pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance,

meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.

3. Tantangan dan Kendala

Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, optimalisasi sistem informasi keuangan daerah, serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi yang terus berkembang.

4. Dampak terhadap Pembangunan Daerah

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah telah berkontribusi terhadap efektivitas perencanaan pembangunan daerah, meskipun masih diperlukan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di masa mendatang:

1. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BPKPD

Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis agar mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi serta mengoptimalkan sistem informasi keuangan daerah.

2. Optimalisasi Sistem Informasi Keuangan

Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan efektivitas tata kelola keuangan.

3. Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD)

Mengembangkan strategi inovatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggali potensi lokal serta memperkuat kerja sama dengan pihak terkait.

4. Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi

Memperkuat mekanisme pengawasan internal serta melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kebijakan untuk memastikan akuntabilitas dan pencapaian target yang lebih optimal.

5. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

Memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan

masyarakat dalam mendukung kebijakan keuangan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan adanya kesimpulan dan rekomendasi ini, diharapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat terus meningkatkan kualitas kinerjanya, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Benteng, 10 Februari 2025

Mengetahui,

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah,



NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19830525 200604 1 016

LAMPIRAN – LAMPIRAN